

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada tuntutan masyarakat akan transparansi dalam penganggaran belanja publik, Transparansi adalah keterbukaan informasi tentang sektor keuangan publik, dimana transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu (Adrianto, 2007). Untuk itu diterapkan sistem penganggaran berbasis kinerja, yaitu suatu konsep yang diharapkan agar kegiatan penganggaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien dalam mengalokasikan sumber daya dan penggunaan anggaran. Sistem anggaran berbasis kinerja atau performance based budgeting ini muncul karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja juga diterapkan agar kegiatan penyusunan dan pengelolaan anggaran akan fokus pada kinerja, bukan kebijakan.

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran berbasis kinerja memperlihatkan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaiannya sehingga prinsip transparansi, efisien, efektivitas, dan akuntabilitas bisa dicapai. Penganggaran adalah proses suatu metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran merupakan rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi

pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Beberapa undang-undang serta peraturan pemerintah yang mengatur tentang penerapan sistem anggaran berbasis kinerja untuk tingkat pusat diantaranya yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, dan PP No. 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Pemandagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan peraturan daerah yang berlaku diantaranya yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pemandagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bastian (2006) menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi yang berkaitan erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi. Menurut Mardiasmo (2002) anggaran kinerja merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan publik. Menurut Halim (2007) anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan *output* dan *outcome* yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian *outcome* dari *output* tersebut.

Dinas Pendidikan adalah unit pelaksana pemerintah dibidang pendidikan yang berada dibawah naungan pemerintah daerah. Dinas pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab pada Bupati/Gubernur melalui Sekretaris Daerah/Provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat salah satu dinas daerah dilingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Melalui visi dan misi Gubernur yang sudah ditetapkan dalam RPJMD provinsi Sumatera Barat serta mempedomani tujuan dan sasaran RPJMD maka tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan Sumatera Barat adalah “Terwujudnya Peningkatan Tingkatan Pendidikan”, dengan visi dan misi tersebut bisa dicapai dengan melihat anggaran kinerja yang diterapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu peneliti tertarik melihat kondisi pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja karena penganggaran berbasis kinerja adalah metode penganggaran yang digunakan manajemen untuk menghubungkan setiap biaya yang dituangkan dalam aktivitas dengan manfaat yang dihasilkan, yang mana manfaat tersebut dijelaskan dalam seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja untuk setiap unit kerja. Serta kendala yang terjadi pada sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan judul **“Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat 2019 - 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021 ?
2. Apakah terdapat masalah dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui masalah yang dihadapi dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan upaya untuk mengatasinya.

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara riset kepustakaan dan mengambil data sekunder dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, berupa laporan akuntabilitas kinerja, DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), dan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) sebagai ilustrasi untuk evaluasi atas perencanaan kinerja dan penuanganganya dalam anggaran.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, antara lain :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang dalam memilih judul, perumusan masalah, tujuan, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian anggaran, kinerja, anggaran berbasis kinerja, indikator kinerja dan peranan *value for money*.

BAB III Gambaran Umum Instansi

Bab ini berisi tentang gambaran umum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari visi dan misi serta tugas pokok.

BAB IV Pembahasan

Bab ini berisi tentang penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

BAB V Penutup

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang dibahas serta saran yang sesuai dengan hasil yang telah dibahas peneliti.

